

Analisis pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat di provinsi riau

By :
Vebby Yunita
Prof. Dr. H. Harlen, SE, M.Si
Drs. Hainim Kadir, SE, M.Si

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia
e-mail : vebbyyunita@gmail.com

Analysis of economic growth on income inequality in the province of Riau community

ABSTRACT

Riau economic growth rate may be an indicator of the increasing level of economic development, which in turn will increase the level of social welfare. One characteristic of the increasing development is increasingly unequal distribution level. However, it appears that the more unequal distribution of income levels, whereas the level of income distribution is needed to support the sustainability of economic growth. Therefore, this study aims to describe the general level of economic growth, the level of income distribution among the public, as well as the relationship between multiple levels of economic growth on income distribution in the province of Riau.

To achieve the first objective used descriptive and analytical tools used for both purposes of data analysis tools panel fixed effect model using STATA 9.

From the analysis shows economic growth still high despite a slowdown, the economic structure changes from the primary sector to the secondary and tertiary sectors. The more besarnya income inequality in Riau Province which is characterized by Gini ratio in 2012, which reached 0:40. From the regression results shown that significant economic growth effect on income inequality. . The higher rate of economic growth, the higher the level of inequality of income communities in Riau province, although in a lower category. Economic growth has a considerable influence on the increase in the Gini ratio Riau Province, it is seen from the value of the elasticity of 0.882666, meaning that a 1 percent change in economic growth would raise the Gini ratio of 0.882666 percent.

Keywords: economic growth, income distribution, panel data

Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi yang tinggi, adil dan merata merupakan hal yang ingin dicapai dalam setiap kegiatan perekonomian baik itu nasional maupun daerah karena tujuan dari pembangunan ekonomi adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat baik di dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan sebagainya.

Perubahan-perubahan tersebut dapat berupa meningkatnya kualitas sumber daya manusia, meningkatnya angka produktivitas, berkurangnya angka kemiskinan, meratanya distribusi pendapatan dengan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin tidak begitu jauh.

Pertumbuhan ekonomi yang terlihat dari peningkatan PDRB Provinsi Riau harga konstan dari tahun 1993 sebesar Rp17.253.795,87 menjadi sebesar Rp 20.264.270,01 pada tahun 1997 dengan laju pertumbuhan 17,45%. Jika dilihat dari lapangan usaha yang berkontribusi tinggi

terhadap PDRB terdapat tiga lapangan usaha yaitu Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, serta Perdagangan, Hotel dan Restoran.

Diantara ketiga lapangan usaha ini sektor Pertambangan dan Penggalian memiliki kontribusi yang terbesar dengan minyak sebagai primadonanya, namun mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan sifat dari barang tambang dan penggalian yang tidak dapat diperbaharukan.

Tabel 1 Distribusi Pendapatan/Pengeluaran Berdasarkan Bank Dunia dan Gini Ratio Provinsi Riau

Distribusi Pembagian Pengeluaran	1989	1990	1993	1996
40% rendah	24.6	24.25	23.5	22.62
40% sedang	39.46	40.22	39.24	36.68
20% tinggi	35.94	35.53	37.26	40.7
Gini Ratio	0.247	0.256	0.266	0.3

Sumber: Riau Dalam Angka 1990-1996

Tingkat ketimpangan pendapatan diantara masyarakat berada pada kategori rendah baik dengan menggunakan metode pengukuran Gini Ratio dan Indikator Bank Dunia. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah berhasil menjaga pemerataan pendapatan masyarakat lebih merata dengan tetap meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Perkembangan PDRB Provinsi Riau dari tahun 2008 sebesar Rp 91.085.381,8 menunjukkan peningkatan pada tahun 2012 dengan besaran PDRB sebesar Rp 106.308.727,36 dengan laju pertumbuhan sebesar 16,71%. Lapangan usaha yang memiliki kontribusi yang besar terhadap PDRB Provinsi Riau masih dipegang oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian walau pun mengalami penurunan.

Melihat perkembangan penduduk miskin di Provinsi Riau mengalami penurunan dari tahun 2008 sebesar 10.63% menjadi 8,22% dari total penduduk pada tahun 2012 dengan laju pertumbuhan - 0,23%. Walaupun mengalami penurunan, namun tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau masih cukup tinggi bila dibandingkan dengan Provinsi lain.

Tabel 2. Kondisi Pertumbuhan dan Kemiskinan Provinsi Riau 2008-2012

TAHUN	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Penduduk Miskin (%)
2012	3.61	8.22
2011	5.01	8.47
2010	4.18	8.65
2009	2.97	9.48
2008	5.65	10.63

Sumber: Riau Dalam Angka Tahun 2008-2012

Pada masa Reformasi hingga sekarang ini, tingkat pemerataan pendapatan masyarakat tidak lagi menjadi hal yang diutamakan, pertumbuhan ekonomi yang tinggilah yang menjadi tujuan utama dari kegiatan perekonomian. Dari terlalu fokusnya pada tujuan utama yaitu pertumbuhan ekonomi, menyebabkan timbulnya permasalahan-permasalahan di dalam masyarakat, seperti masih adanya masyarakat miskin dan ketidak merataan pendapatan sehingga yang kaya menjadi semakin kaya dan miskin menjadi semakin miskin.

Sebenarnya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan serta pengentasan kemiskinan dapat berjalan beriringan dan saling menguntungkan. Dengan tingkat kemiskinan rendah dan distribusi pendapatan yang merata akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bila masyarakat sudah terjamin akan kebutuhannya maka tingkat produktivitasnya akan semakin tinggi pula

yang akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, dapat diidentifikasi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

“Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat di Provinsi Riau?”

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah :

Untuk membuktikan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat di Provinsi Riau.

2. Manfaat Penelitian

1. Dapat menambah khasanah pengetahuan yang ada.
2. Dapat menjadi bahan rujukan pemerintah dalam evaluasi dan pembuatan kebijakannya yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan.
3. Sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

Tinjauan Pustaka

A Distribusi Pendapatan

Para ekonom pada umumnya membedakan dua ukuran pokok distribusi pendapatan, yaitu:

1. Distribusi Pendapatan Perseorangan (*personal distribution of income*)

Distribusi pendapatan perseorangan (*personal distribution of income*) atau distribusi ukuran pendapatan (*size distribution of income*) secara

langsung menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga.

Individu diurutkan semua hanya berdasarkan pendapatan yang diterimanya, lantas membagi total populasi menjadi sejumlah kelompok atau ukuran. Biasanya populasi dibagi total populasi menjadi lima kelompok, atau kuintil (*quintiles*) atau sepuluh kelompok yang disebut desil (*decile*) sesuai dengan tingkat pendapatan mereka, kemudian menetapkan berapa proporsi yang diterima oleh masing-masing kelompok dari pendapatan nasional total (Todaro, 2006: 234).

Terdapat beberapa ukuran untuk merefleksikan ketimpangan pendapatan yaitu koefisien Gini (*Gini Ratio*) dan Kurva Lorenz, Ukuran Bank Dunia, Indeks Theil dan Indeks-L.

1.1 Koefisien Gini (*Gini Ratio*) & Kurva Lorenz

Koefisien Gini (*Gini Ratio*) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Metode perhitungan Indeks/Koefisien Gini digunakan rumus:

$$RG = 1 - \sum_{i=1}^k f_i(Y_i^* + Y_{i-1}^*)$$

(Dajan, 2000: 106)

dimana:

RG = Rasio Gini

k = Jumlah Kelas

f_i = % atau proporsi jumlah masyarakat dalam kelas i

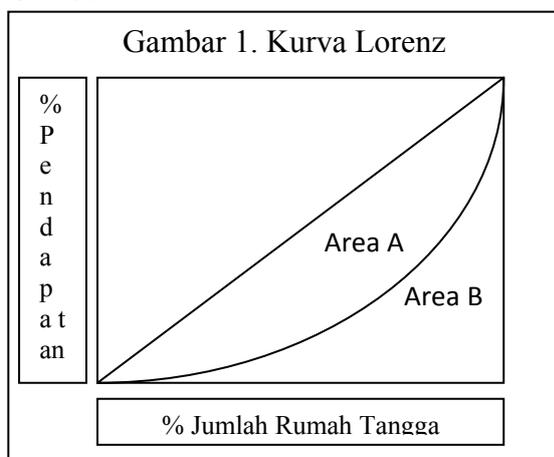
Y_i^* = % atau proporsi secara kumulatif dari jumlah pendapatan masyarakat sampai kelas ke- i

Oshima (BPS, 2011: 5-6) menetapkan sebuah kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah pola pengeluaran suatu masyarakat ada pada ketimpangan taraf rendah, sedang atau

tinggi. Untuk itu ditentukan kriteria sebagai berikut :

- Ketimpangan taraf rendah, bila $G < 0,35$
- Ketimpangan taraf sedang, bila G antara $0,35 - 0,5$
- Ketimpangan taraf tinggi, bila $G > 0,5$

Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Untuk membentuk koefisien Gini, grafik persentase kumulatif penduduk (dari termiskin hingga terkaya) digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran (pendapatan) digambar pada sumbu vertikal. Ini menghasilkan kurva Lorenz seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.



Sumber: Todaro, 2006

Garis diagonal mewakili pemerataan sempurna. Koefisien Gini didefinisikan sebagai $A/(A+B)$, dimana A dan B seperti yang ditunjukkan pada Gambar. Jika $A=0$ koefisien Gini bernilai 0 yang berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika $B=0$ koefisien Gini akan bernilai 1 yang berarti ketimpangan sempurna.

1.2 Ukuran Bank Dunia

Bank Dunia mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan: 40% penduduk dengan pendapatan rendah, 40% penduduk dengan pendapatan menengah dan 20% penduduk dengan pendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk.

Kategori ketimpangan ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut: (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2012:III-16)

- Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi;
- Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang/ menengah;
- Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah.

2. Distribusi Fungsional

Distribusi fungsional atau distribusi bagian faktor yang mencoba menjelaskan bagian dari total pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing faktor produksi. Teori dan ukuran mengenai distribusi pendapatan fungsional hendak mempertanyakan persentase pendapatan yang akan diterima oleh tenaga kerja secara keseluruhan dan perbandingannya dengan persentase dari total pendapatan yang dibagikan dalam bentuk sewa, bunga dan keuntungan (yaitu hasil dari

pengolahan atau penyewaan tanah, pendayagunaan modal fisik dan finansial).

B Pertumbuhan Ekonomi

1.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi (http://id.wikipedia.org/wiki/Pertumbuhan_ekonomi).

Menurut Samuelson & Nordhaus (2003: 250-251) terdapat empat faktor pertumbuhan, yaitu

- a. Sumber daya manusia
Input tenaga kerja terdiri dari kuantitas tenaga kerja dan keterampilan angkatan kerja. Banyak ekonom menyakini bahwa kualitas input tenaga kerja, yaitu ketrampilan, pengetahuan, dan disiplin angkatan kerja adalah satu-satunya unsur penting dari pertumbuhan ekonomi.
- b. Sumber daya alam
Sumber-sumber daya yang penting ini adalah tanah yang baik untuk ditanami, minyak dan gas, hutan, air, mineral, bahan bakar, kualitas lingkungan. Beberapa Negara dengan sumber daya alam yang melimpah telah mengalami pertumbuhan dengan output besar dalam bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan, misalnya Kanada dan Norwegia.
- c. Pembentukan modal
Modal nyata mencakup struktur-struktur seperti jalan dan

pembangkit tenaga listrik, peralatan seperti truk dan computer dan persediaan barang (*stock of inventories*). Modal nyata ini digunakan untuk meningkatkan produktivitas produksi yang menunjang pertumbuhan ekonomi.

- d. Teknologi dan inovasi
Kemajuan teknologi telah menjadi unsur vital dari pertumbuhan standar hidup yang pesat. Arus penemuan dan kemajuan teknologi yang tidak pernah berakhir menyebabkan kemajuan besar dalam kemungkinan produksi di Eropa, Amerika Utara dan Jepang.

Rumus menghitung pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut : (http://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_nasional)

$$g = \{(PDBs - PDBk) / PDBk\} \times 100\%$$

diketahui:

g = tingkat pertumbuhan ekonomi

$PDBs$ = PDB riil tahun sekarang

$PDBk$ = PDB riil tahun kemarin

Hipotesis

Berdasarkan teori dan permasalahan yang ada, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah

Ha : Diduga Tingkat Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Riau.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Provinsi Riau yang meliputi waktu penelitian yang dilakukan adalah pada periode 2008-2012. Dipilihnya Provinsi Riau dikarenakan laju pertumbuhan ekonominya yang tinggi, tingkat persentase penduduk miskin yang semakin turun namun tingkat distribusi pendapatan yang di keluarkan oleh instansi BPS Provinsi Riau semakin tinggi setiap

tahunnya selama rentang waktu tahun 2008 sampai dengan 2012.

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersifat *time series* yang mencakup dari tahun 2008-2012 dan *cross section* dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari instansi pemerintah atau yang terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, serta buku referensi dan kepustakaan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Untuk keperluan penelitian ini data yang dibutuhkan merupakan keseluruhan data Provinsi Riau, yang mencakup data Pengeluaran Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto perkapita, dan data Kemiskinan

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Studi kepustakaan (*library riset*), yaitu suatu metode pengumpulan data dengan informasi dengan jalan membaca, mempelajari dan membahas buku-buku ilmu pengetahuan, tulisan ilmiah serta bahan lain (jurnal, internet) yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini
2. Menghimpun data sekunder, yakni data dan informasi yang telah dipublikasikan oleh instansi-instansi terkait yaitu Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, serta instansi lain yang berkaitan dengan penelitian ini

Metode Analisa Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan bantuan STATA 9. Data panel adalah gabungan antara data runtut waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*).

Model dari panel data memungkinkan untuk mengestimasi banyak data. Bentuk dari model estimasi panel data adalah sebagai berikut

$$Y_{it} = \alpha + \beta X_{it} + \epsilon_{it}$$

$$i \text{ (subjek/observasi)} = 1, 2, 3, \dots, n$$
$$t \text{ (waktu)} = 1, 2, 3, \dots, t$$

Pemodelan dalam regresi data panel dapat menggunakan tiga pendekatan metode alternative pengolahan, yaitu (1) *Metode Common-Constant (The Pooled OLS Method)*, (2) *Metode Fixed Effect (FEM)*, dan (3) *Metode Random Effect (REM)*

1. Model Regresi OLS Pooled (*Common Effect*)

Estimasi *Common Effect* yaitu teknik regresi yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel dengan cara hanya mengestimasi data panel dengan cara hanya mengkombinasikan data *time series* dan *cross section* (Mirza, 2012: 7). *Common Effect* menggabungkan data *time series* dan *cross section* tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu sehingga diasumsikan bahwa perilaku data antar ruang sama dalam berbagai kurun waktu. Model dasar dari *Common Effect* :

$$y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \omega_{it}$$

$$\omega_{it} = \mu_i + \epsilon_{it}$$

Dimana:

$$i \text{ (indeks unit } cross\text{-section)} \\ = 1, 2, \dots, N$$

$$t \text{ (indeks waktu)} = 1, 2, \dots, T$$

$$N = \text{jumlah unit lintas sektoral}$$

$$T = \text{jumlah periode waktu}$$

2. Model Pendekatan Efek Tetap (*Fixed Effect*)

Dikatakan *Fixed Effect* adalah karena meskipun intersep berbeda-beda untuk tiap-tiap subjek, tetapi tiap intersep tiap entity tidak berubah seiring waktu, itulah yang dimaksud sebagai *time-invariant*. Model ini dapat digunakan untuk melihat perilaku data dari masing-masing variabel sehingga data lebih dinamis dalam menginterpretasikan data. Pada model *Fixed Effect*, estimasi dapat dilakukan dengan pembobot atau tanpa pembobot. Menurut Gujarati (Mirza, 2012: 7), tujuan dilakukannya pembobotan adalah untuk mengurangi heterogenitas antar unit *cross section*.

Pemilihan model antara *Common Effect* dan *Fixed Effect* dapat dilakukan dengan menggunakan F *restricted* yaitu dengan melihat nilai Prob. F

Ho : Prob. F > α → *Common Effect*

H1: Prob. F < α → *Fixed Effect*

3. Model Pendekatan Efek Acak (*Random Effect*)

Tidak seperti dalam *Fixed Effect*, dimana diberikan setiap entity nilai intersep yang tetap, *Random Effect* mengasumsikan bahwa nilai intersep adalah sebuah nilai acak dari populasi entity yang lebih besar (Gujarati, 2009: 239).

Dalam model efek acak, parameter-parameter yang berbeda antar daerah maupun antar waktu dimasukkan ke dalam *error*. Karena inilah, model efek acak juga disebut model komponen *error* (*error component model*) (Mirza, 2012:8).

Pemilihan model antara *Random Effect* dan *Fixed Effect* dapat dilakukan dengan menggunakan Uji Hausman (*Hausman Test*)

Ho : Prob. F > α → *Random Effect*

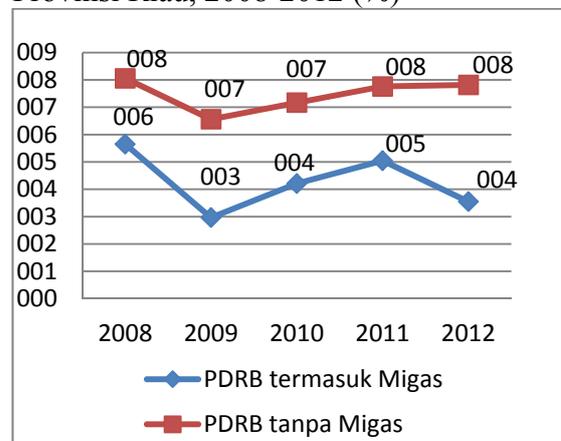
H1: Prob. F < α → *Fixed Effect*

Hasil Penelitian

1. Kondisi Perekonomian

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat pada suatu daerah/Negara biasanya dalam kurun satu tahun. Untuk melihat gambaran tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau dilihat dari besarnya tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Gambar 2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau, 2008-2012 (%)



Sumber: Data diolah

Gambar 2 menggambarkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan setiap tahunnya, walaupun tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2012 tidak setinggi pada tahun 2008. Hal ini dikarenakan beberapa kejadian baik dari dalam maupun luar Provinsi Riau, seperti bencana banjir dan tanah longsor, krisis ekonomi AS, turunnya harga CPO, serta krisis ekonomi Eropa.

Tingkat pertumbuhan ekonomi termasuk migas mengalami penurunan dari tahun 2008 sebesar 5,65% turun pada tahun 2009 sebesar 2,68% menjadi 2,97%, kemudian mengalami peningkatan walaupun tidak setinggi pada tahun 2008 yaitu pada tahun 2012 sebesar 3,55%. Penurunan pertumbuhan ekonomi ini dikarenakan dampak dari krisis keuangan yang menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat dan turunnya ekspor beberapa

komoditi utama Provinsi Riau karena menurunnya permintaan pasar internasional.

Kontribusi setiap lapangan usaha tanpa migas terhadap PDRB Provinsi Riau tahun 2008-2012, terjadi penurunan pada sektor Pertanian, Peternakan Kehutanan dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, serta Industri Pengolahan. Sedangkan sektor yang mengalami peningkatan adalah subsektor Bangunan, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Keuangan Persewaan Dan Jasa Perusahaan, serta Sektor Jasa-jasa. Hal ini terkait akan persiapan beberapa kegiatan baik dalam skala nasional dan internasional, misalnya PON XVII dan ISG.

Tabel 3 Laju Pertumbuhan ekonomi tanpa Migas (%)

Tahun	Riau	Sumatera	Indonesia
2008	8.06	6.25	6.46
2009	6.56	5.07	4.96
2010	7,17	6,46	6,60
2011	7,76	6,89	6,77
2012	7,82	6,98	6,88

Sumber : PDRB Riau Menurut Lapangan Usaha 2008-2012

Perkembangan tren positif pertumbuhan ekonomi tanpa migas Provinsi Riau terlihat dari tabel 3 Laju Pertumbuhan Ekonomi tanpa Migas. Laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas Provinsi Riau selalu berada diatas pertumbuhan ekonomi tanpa migas Sumatera maupun Indonesia.

2. Keadaan Ketimpangan Pendapatan

Tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah dapat dilihat dari perkembangan Indeks Gini daerah tersebut. Indeks gini Provinsi Riau

pada tahun 2008 sebesar 0,30 yang berarti bahwa dari sampel rumah tangga penerima pendapatan, memperoleh sekitar 30% persen pendapatan daerah. Pertumbuhan Indeks Gini Provinsi Riau menunjukkan tren negatif dengan naiknya indeks gini dari tahun 2008 sebesar 0,30 menjadi 0,34 pada tahun 2012 dengan laju peningkatan sebesar 9.677%. Namun masih dapat digolongkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan Provinsi Riau tergolong rendah. Jika dibandingkan dengan tingkat indeks gini Indonesia yang menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya yang pada tahun 2012 mencapai 0,41 yang tergolong ketimpangan pendapatan sedang, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan Provinsi Riau lebih merata dibandingkan tingkat ketimpangan pendapatan Indonesia

Berdasarkan gambaran ketimpangan pendapatan yang dikeluarkan Bank Dunia, ketimpangan pendapatan Provinsi Riau berada pada kategori ketimpangan rendah walaupun persentase pendapatan yang didapat oleh 40% penduduk yang berpendapatan rendah mengalami penurunan. Pada tahun 2008, pendapatan yang didapat oleh 40% penduduk yang berpendapatan rendah sebesar 20.54, kemudian meningkat pada tahun 2009 menjadi 21.24.

Pada tahun 2010 menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, besarnya penurunan adalah 0,02. Penurunan ini diindikasikan oleh terjadinya penurunan pendapatan masyarakat akibat beberapa kejadian yang terjadi sepanjang tahun 2009 seperti terjadinya krisis ekonomi dunia, penurunan harga minyak dunia dan penurunan harga CPO serta TBS yang menyebabkan penurunan kinerja perekonomian Provinsi Riau

Tabel 4 Ketimpangan Pendapatan Provinsi Riau 2008-2012

Distribusi Pendapatan	2008	2009	2010	2011	2012

- 40 % penduduk dengan pendapatan terendah	20.54	21.24	21.22	19.86	19.06
- 40 % penduduk dengan pendapatan menengah	39.32	38.86	38.01	36.52	35.46
- 20 % penduduk dengan pendapatan tertinggi	40.14	39.89	40.77	43.62	45.48
Gini Indeks	0.30	0.28	0.28	0.32	0.34

Sumber: Data diolah

Pada tabel 4 memperlihatkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan menurut daerah di Provinsi Riau menunjukkan daerah pedesaan merupakan daerah yang memiliki tingkat ketimpangan pendapatan yang rendah dibandingkan daerah perkotaan.

Pada tahun 2008 tingkat ketimpangan pendapatan berdasarkan indeks gini, daerah pedesaan sebesar 0,28 kemudian naik pada tahun 2012 menjadi 0,30 dengan laju peningkatan sebesar 7.14%, sedangkan pada daerah perkotaan pada tahun 2008 sebesar 0,53 dan menunjukkan penurunan pada tahun 2012 menjadi 0,35, walaupun pada proses penurunan tersebut mengalami fluktuasi. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa ketimpangan menurut daerah berada pada ketimpangan yang sedang.

Tabel 5 Perkembangan Indeks Gini Prov. Riau Berdasarkan Daerah, 2008-2012 (%)

Daerah	Tahun	40% Rendah	40% Sedang	20% Tinggi	Ratio Gini
Desa	2008	21.22	39.93	38.86	0.28
	2009	22.35	39.68	37.97	0.27
	2010	23.32	39.76	36.91	0.26

	2011	21.44	37.57	40.99	0.29
	2012	21.45	37.28	41.28	0.30
Kota	2008	60.76	39.24	0	0.53
	2009	22.46	38.81	38.72	0.27
	2010	20.95	37.05	42.00	0.28
	2011	56.52	43.48	0	0.33
	2012	54.37	45.63	0	0.35

Sumber: Data diolah

Berdasarkan kategori ketimpangan pendapatan Bank Dunia, 40% penduduk pendapatan rendah daerah pedesaan menunjukkan peningkatan dari tahun 2008 hingga 2010 yang menjadi 23.32, kemudian mengalami penurunan menjadi 21.45 pada tahun 2012. Walaupun terjadinya penurunan, ketimpangan pendapatan Provinsi Riau daerah pedesaan masih berada pada kategori rendah. Sedangkan daerah perkotaan pendapatan yang didistribusikan pada 40% penduduk pendapatan rendah mengalami fluktuasi namun tetap berada pada kategori ketimpangan rendah.

3. Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Dilihat dari hasil uji Hausman diketahui bahwa nilai Prob. F (Prob>chi2 = 0.0646) lebih besar dari pada nilai 0.05, sehingga model *random effect* lebih baik dibandingkan dengan *fixed effect*.

a. Model Persamaan Regresi

Berdasarkan hasil analisis regresi panel dengan STATA 9, dapat dibuat persamaan regresi untuk model penelitian sebagai berikut:

$$\text{Gini Ratio} = 0.0043312 + 0.0360025 \text{ pertumbuhan}$$

Berdasarkan hasil penghitungan dan persamaan regresi sederhana tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai

pengaruh positif terhadap gini ratio sebesar 0.0360025. Nilai konstanta adalah sebesar 0.0043312, artinya jika pertumbuhan ekonomi sama dengan nol, maka gini ratio adalah sebesar 0.0043312 dengan asumsi variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi dianggap tetap.

b. Hasil Uji Statistik t

Berdasarkan hasil *random effect* terlihat bahwa nilai t-hitung sebesar 0.003 lebih kecil dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat Provinsi Riau.

c. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.2040. Hal ini menunjukkan kemampuan variabel pertumbuhan ekonomi mempengaruhi naik turunnya nilai ketimpangan pendapatan sebesar 20.40% dan masih terdapat 79.60% variabel lain yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan.

4. Pendapatan Masyarakat

Tabel 6 Pendudukan Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Dan Daerah 2012 (Jiwa)

Lapangan Usaha	Kota	Desa	Total
Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan	82,127	990,897	1,073,024
Pertambangan dan penggalian	25,464	19,191	44,655
Industri Pengolahan	128,492	20,496	148,988
Listrik, gas dan air	3,848	4,194	8,042
Bangunan	78,144	44,395	122,539
Perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel	312,355	180,375	492,730
Angkutan, pergudangan	59,915	37,212	97,127

dan komunikasi			
Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan	44,228	22,635	66,863
Jasa kemasyarakatan	201,834	141,900	343,734
JUMLAH	2,588,472	2,298,387	4,886,859

Sumber: pusdatinaker.balitfo.depnakertrans.go.id/

Pada tabel diatas terlihat bahwa lapangan usaha yang banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan dengan banyak pekerja sebesar 1,073,024 jiwa dan daerah yang banyak memperkerjakan tenaga kerja di sektor ini berada di pedesaan, yaitu sebanyak 990,897 jiwa, sedangkan daerah perkotaan hanya sebesar 82,127. Hal ini dikarenakan subbidang sektor Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan sebagian besar terdapat di daerah pedesaan.

Namun besarnya upah/gaji yang diterima oleh para pekerja sebagian besar hanya menerima sebesar Rp 1.000.000-Rp 1.499.999. namun hal ini tidaklah terlalu berpengaruh besar terhadap kesejahteraan masyarakat karena biaya hidup yang dibutuhkan di daerah pedesaan masih rendah bila dibandingkan dengan daerah perkotaan.

Bila pada sektor Perdagangan besar, Eceran, Rumah makan dan Hotel yang sebagian besar kegiatannya berada di daerah perkotaan terlihat bahwa sebagian besar pekerjanya hanya bergaji Rp 500.000-Rp 999.999, yaitu sebanyak 38,110 jiwa. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat yang mana kebutuhan hidup yang baik atau

hidup layak didaerah perkotaan itu sangat tinggi.

5. Keadaan Kemiskinan

Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Provinsi Riau mengalami penurunan setiap tahunnya dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Berdasarkan jumlah penduduk miskin Provinsi Riau terlihat terjadi fluktuasi, akan tetapi condong menurun jumlah penduduk miskin. Pada tahun 2008 terdapat penduduk miskin sebanyak 584.700 jiwa menjadi 481.300 jiwa tahun 2012. Peningkatan jumlah penduduk miskin terjadi pada tahun 2010 dan tahun 2012 dengan peningkatan masing-masing sebanyak 26000 jiwa dan 8800 jiwa.

Tren peningkatan jumlah penduduk miskin pada tahun 2012 juga terjadi di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, sedangkan tren peningkatan jumlah penduduk pada tahun 2010 dan 2012 terjadi pada 5 (lima) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Siak, Kampar, Bengkalis, Kota Pekanbaru serta Dumai.

Sedangkan persentase penduduk miskin terhadap seluruh penduduk di Provinsi Riau menunjukkan tren positif baik itu ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pada tingkat Provinsi pada tahun 2008 terdapat 10,74% penduduk miskin kemudian turun pada tahun 2012 sebesar 8,05%. Laju penurunan penduduk miskin ini sebesar 33,42%.

Persentase penduduk miskin yang terbanyak masih terdapat pada daerah pedesaan yang pada Bulan Maret 2008 sebesar 12,16% turun menjadi 9,36% pada Maret 2012 dengan laju penurunan 23,03%.

Pada daerah Perkotaan terjadi pula penurunan, yang pada bulan Maret 2011 sebesar 6,37% turun 2,69% dari bulan Maret 2008, namun menunjukkan peningkatan pada Maret 2012 menjadi 6,43%.

Tabel 7 Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Riau menurut Desa-Kota 2008-2012 (%)

Tahun	Persentase Penduduk Miskin	
	Kota	Desa
Maret 2008	9,12	12,16
Maret 2009	8,04	10,93
Maret 2010	7,17	10,15
Maret 2011	6,37	9,83
Maret 2012	6,43	9,36

Sumber: Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Riau Tahun 2012

Garis kemiskinan Provinsi Riau menunjukkan peningkatan setiap tahunnya yaitu pada tahun 2008 sebesar Rp 229.371,00 naik menjadi Rp 300.791,00 dengan laju pertumbuhan sebesar 31,14%. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) masih memberikan jumlah sumbangan yang terbesar terhadap Garis Kemiskinan dibandingkan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Persentase GKM dari tahun 2008-2012 menunjukkan peningkatan sedangkan GKNM menunjukkan hal yang sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan komoditas makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan).

Tingkat Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Riau pada tahun 2008 hingga 2012 mengalami fluktuasi. Pada tahun tahun 2008 sebesar 1,63 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2009, yang kemudian naik kembali pada 2010 kemudian mengalami penurunan hingga tahun 2012. Penurunan Indeks ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin sudah mendekati garis kemiskinan.

Sama halnya dengan tingkat Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan juga mengalami fluktuasi, yang pada tahun 2010 terjadi peningkatan dari tahun 2009 sebesar 0,24,

namun setelah tahun 2010 mengalami tren penurunan, yang berarti bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk miskin relatif mengalami penurunan.

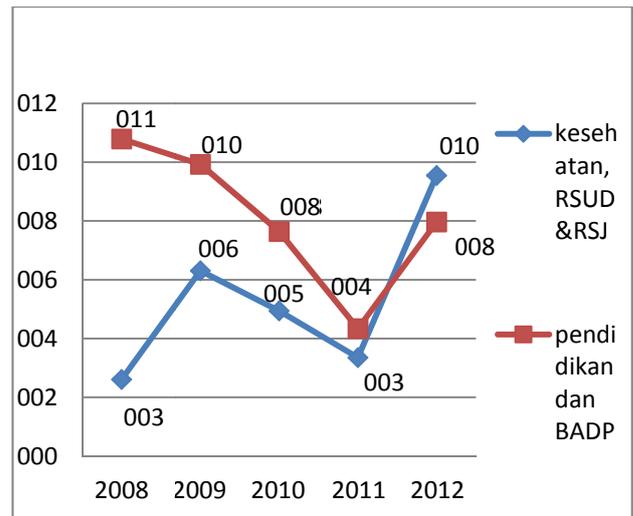
Tingkat Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan berdasarkan daerah menunjukkan bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan daerah perkotaan lebih kecil dibandingkan daerah pedesaan.

6. Implikasi

Untuk mewujudkan pemerataan pendapatan ini, pemerintah Provinsi Riau melakukan beberapa program, pembiayaan program ini dapat terlihat dari besarnya alokasi APBD. Upaya mewujudkan pemerataan pendapatan bisa terlihat pada peningkatan alokasi belanja modal pemerintah baik pada sektor pendidikan dan kesehatan masyarakat. Pada tahun 2008 alokasi APBD di sektor pendidikan sebesar 10,79% kemudian turun hingga 4,34% pada tahun 2011, kemudian naik kembali menjadi 7,97% pada tahun 2012.

Sedangkan pada Alokasi APBD di sektor kesehatan tahun 2008 sebesar 2,60%, meningkat pada tahun 2009 menjadi 6,31%. Kemudian mengalami penurunan hingga tahun 2011 dengan penurunan alokasi APBD sebesar -88,36%.

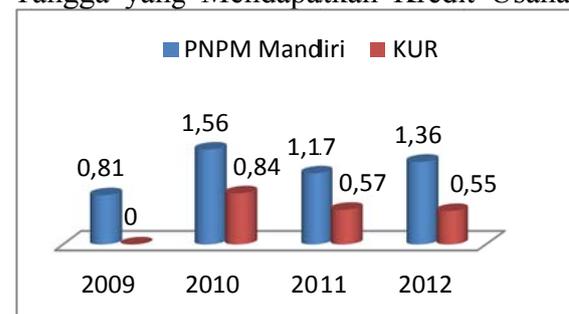
Gambar 3. Pelayanan Kesehatan 2008-2012



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau Tahun 2009-2013

Selain upaya dalam sektor kesehatan dan pendidikan, usaha lain yang dilakukan oleh pemerintah adalah pemberian kredit kepada masyarakat untuk memajukan usahanya, jenis kredit yang diberikan oleh pemerintah adalah PNPM Mandiri dan KUR. Pemberian kredit ini diharapkan untuk membantu masyarakat yang dalam mengembangkan usahanya khususnya masyarakat kelas menengah kebawah.

Gambar 5. Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Kredit Usaha



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau Tahun 2009-2013

Secara makro dapat terlihat pengaruh dari naiknya tingkat pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan dari nilai elastisitasnya. Besaran nilai elastisitas dari

tingkat pertumbuhan ekonomi terhadap gini ratio adalah sebagai berikut

$$E = b_1 \frac{\bar{X}}{\bar{Y}}$$

$$E = 0.0360025 \times \frac{7.472}{0.30}$$

$$E = 0.882666$$

Besarnya elastisitas adalah 0.882666, artinya bahwa perubahan 1 persen pertumbuhan ekonomi akan menaikkan gini ratio sebesar 0.882666 persen. Dari indikasi ini, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kenaikan gini ratio di Provinsi Riau.

Kesimpulan

Dari analisis penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan, diantaranya adalah

1. Tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau dengan migas mengalami perlambatan, hal ini dikarenakan faktor natural yaitu semakin tuanya usia sumur minyak yang ada di Provinsi Riau. Peningkatan justru terjadi pada pertumbuhan ekonomi tanpa migas yang menunjukkan peningkatan setiap tahunnya
2. Tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat Provinsi Riau menunjukkan tren negatif yaitu semakin tidak meratanya tingkat pendapatan masyarakat baik menggunakan perhitungan indeks gini maupun *income inequality* Bank Dunia walaupun masih dalam kategori rendah.
3. Tingkat pertumbuhan kemiskinan di Provinsi Riau juga menunjukkan tren positif yang menunjukkan penurunan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk di Provinsi Riau.

Saran

Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang masih tinggi, dan terjadinya penurunan tingkat kemiskinan tetapi dengan tingkat ketimpangan pendapatan yang semakin tidak merata, diharapkan pemerintah dapat mengatasi permasalahan ini dengan berbagai kebijakan yang mendukung semakin mengecilnya jurang pendapatan diantara masyarakat, sehingga tidak memberikan dampak yang buruk terhadap kegiatan perekonomian maupun sosial bagi masyarakat di Provinsi Riau dimasa yang akan datang. Salah satu cara yang dapat ditempuh oleh pemerintah dengan semakin mendorong sektor-sektor yang banyak menyerap tenaga kerja atau padat karya bukannya padat modal, misalnya pertanian dan UKM padat karya. Dan diharapkan pemerintah juga memperhatikan tingkat kesejahteraan pekerja disektor tersebut dengan cara memperhatikan tingkat pendapatan pekerja.

Daftar Pustaka

- BPS, 2008. Analisis Dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2008. Jakarta: BPS
- _____, 2012. Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi Indonesia Agustus 2012. Jakarta: BPS
- _____, 2012. Riau dalam angka 2012. Pekanbaru: BPS Provinsi Riau.
- _____, 2012. PDRB Riau menurut lapangan usaha 2008-2012. Pekanbaru: BPS Provinsi Riau.
- _____, 2009. Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Riau Tahun 2009.
- _____, 2010. Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Riau Tahun 2010.

- _____, 2011. Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Riau Tahun 2011.
- _____, 2012. Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Riau Tahun 2012.
- _____, 2009. Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau Tahun 2009
- _____, 2010. Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau Tahun 2010
- _____, 2011. Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau Tahun 2011
- _____, 2012. Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau Tahun 2012
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau, 2012. Dokumen Perhitungan & Analisis Kemiskinan Provinsi Riau, Pekanbaru: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau.
- Dajan, Anto. 2000. Pengantar Metode Statistik Jilid I. Jakarta: LP3ES.
- Gujarati, N. Damonar dan Dawn C. Porter, 2009. Dasar-dasar Ekonometrika Buku 2, New York: McGraw-Hill Education.
- Hariadi, Pramono, Ariantoko dan Icut Rangga Bawono. 2008. Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah, *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol.13(2): 61-70
- HM, Syamsudin. Oktober 2011. Perhitungan Indeks Gini Ratio dan Analisis Kesenjangan Distribusi Pendapatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006-2010, *Jurnal Paradigma Ekonomika*, Vol. 1(4): 83-102
- Makmur, T., Safrida dan Kharisma Jayanthi. 2011. Ketimpangan Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Masyarakat Desa Di Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, *Jurnal Agrisep*, Vol. 12 (11):1-10
- Mardiana, Sari Bulan T, dan Isnaniah LKS. Januari 2009. Kajian Perubahan KonJumlahsi dan Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Pekerja Sektor Informal Di Kota Medan, *Jurnal Non-Eksakta-HEKSPI*, Vol. 1(1)
- Masli, Lili. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Regional Antar Kabupaten Kota Di Propinsi Jawa Barat. [Http://Stan-Im.Ac.Id/Jsma/Pdf/Vol1/](http://Stan-Im.Ac.Id/Jsma/Pdf/Vol1/), 5 Januari 2014
- Mirza, Denni Sulistio, 2012. Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah Tahun 2006-2009, *Economies Development Analysis Journal*, Vol 1(1):1-15
- Sasana, Hadi. Maret 2009. Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Antar Daerah Dan Tenaga Kerja Terserap Terhadap Kesejahteraan Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Dalam Era Desentralisasi Fiskal, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Vol. 16(1): 50 - 72

- Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus, 2001. Ilmu Makro Ekonomi (Edisi ketujuh belas), Jakarta: PT. Media Global Edukasi.
- _____, 2003. Ilmu Mikro Ekonomi (Edisi ketujuh belas), Jakarta: PT. Media Global Edukasi.
- Sawotong, Arnold Pontoh, Jen Tatum, Caroline E. Pakasi. 2013. Analisis Pengaruh Distribusi Pendapatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Kota Manado, *Jurnal COCOS*, Vol. 3 (6)
- Sukirno, Sadono, 2006. Makroekonomi Teori Pengantar, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- _____, 2010. Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan, Jakarta ; Kencana.
- Setiawan dan Dwi Endah Kusri, 2010. Ekonometrika, Yogyakarta: ANDI.
- Todaro, Michael P, 1995. Pembangunan ekonomi (Edisi Ketiga). Jakarta : Bumi Aksara.
- _____, 2000. Pembangunan ekonomi (Edisi Kelima). Jakarta : Bumi Aksara.
- _____, 2006. Pembangunan ekonomi (Edisi Kesembilan, Jilid 1). Jakarta : Erlangga.
- Waluyo, Joko. Juni 2004. Hubungan Antara Tingkat Kesenjangan Pendapatan Dengan Pertumbuhan Ekonomi: Suatu Studi Lintas Negara, *Jurnal*
- Ekonomi Pembangunan* Vol. 9(1): 1 – 20
- <http://bi.go.id>, 2 April 2014
- http://id.wikipedia.org/wiki/Pertumbuhan_ekonomi, 5 Januari 2014
- http://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_nasional, 5 Januari 2014
- http://id.wikipedia.org/wiki/Trilogi_Pembangunan, 5 Januari 2014
- <http://pusdatinaker.balitfo.depnakertrans.go.id/>, 7 Juni 2014